OMBUDSMAN PAPUA BARAT TEKANKAN PELAYANAN KESEHATAN TANPA DISKRIMINASI BAGI ODHIV

Kamis, 19 November 2026 - papbar

MANOKWARI - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menegaskan bahwa setiap orang, termasuk orang dengan HIV (ODHIV), berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan bebas diskriminasi. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk "Pelayanan Publik adalah HAM: Bersama Kita Cegah HIV/AIDS" di Hotel Aston, Manokwari, Rabu (18/11/2026).

Dalam pemaparannya, Atkana menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, penyelenggara layanan kesehatan harus memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan tanpa stigma, penolakan, maupun perlakuan diskriminatif, termasuk berdasarkan status HIV.

"Pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya diukur dari ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan pelayanan," ujar Atkana.

Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan juga ditentukan oleh kepastian prosedur, keterbukaan informasi, perlindungan kerahasiaan data pasien, serta profesionalitas tenaga kesehatan. Aspek tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan menghormati hak masyarakat.

Atkana juga menyoroti pentingnya penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami hambatan pelayanan atau perlakuan diskriminatif dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Selain penguatan sistem pengaduan, Amus mendorong peningkatan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman yang dapat memicu stigma dan diskriminasi, baik di lingkungan masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, perwakilan Komisi IV DPRD, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, BPJS Kesehatan Manokwari, Lembaga Pusat Pengkajian Penelitian Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH P3BHPK), perwakilan puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD), Yayasan Sorong Sehati, paralegal dan petugas advokasi YSPSRI, serta petugas lapangan PSSP Yayasan Papua Lestari (YAPARI).

Melalui kegiatan ini, Ombudsman Papua Barat mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat perlindungan hak pasien, serta memastikan upaya pencegahan HIV/AIDS berjalan tanpa diskriminasi.

Atkana menegaskan bahwa status HIV seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi penyelenggara layanan kesehatan untuk menolak, membatasi, atau membedakan pelayanan. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang setara sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku. (OHEBG/ORI-Papbar)